

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Hasil Advokasi Kebijakan oleh Gerakan Perempuan di Uni Eropa

No	Bidang	Tuntutan	Oleh	Hasil Kebijakan
1	Ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gender gap</i> untuk disetarakan (gaji, partisipasi, diskriminasi, dan rekonsiliasi kerja-keluarga) bagi pekerja perempuan</li> <li>- Pendidikan untuk menghilangkan <i>gap</i> kualitas pekerjaan</li> <li>- Perlindungan sosial</li> <li>- Kekerasan terhadap perempuan</li> <li>- Partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan politik</li> <li>- <i>Women entrepreneur</i> dan pendidikan skill bagi perempuan</li> </ul>	ESU, EWL, WIDE+, dan EIWH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Strategy for Equality between Women and Men</i> 2010-2015 dan 2016-2019 dan monitor laporan tahunan nya</li> <li>- <i>European Pact for Gender Equality</i> 2011-2020</li> <li>- <i>Women's Charter</i> 2010</li> <li>- <i>Council Decision (EU) 2015/1848</i> yang berisi tentang partisipasi, kesetaraan gaji, dan rekonsiliasi antara pekerjaan dan keluarga (child care dan pendidikan anak) bagi pekerja perempuan serta penghilangan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.</li> <li>- Salah satu strategi dalam <i>Digital Single Market</i> 2015 yang dicanangkan oleh Komisi Eropa (<i>Women in Digital skills, Education and Women Entrepreneurs</i>)</li> </ul>

2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuntutan akan pengarusutamaan gender, terutama bidang perdagangan yang belum mendapatkan perhatian (<i>gender blind ke gender sensitive</i>)</li> <li>- Kebijakan dan program yang nyata dalam memperkecil ketidaksetaraan upah perempuan dan laki-laki (<i>Gender equal pay gap</i>)</li> <li>- Memfasilitasi istri agar dapat menyeimbangkan urusan pekerjaan dan mengurus keluarga (<i>Work-life balance</i>)</li> <li>- <i>Women in board</i> pada perusahaan atau korporasi</li> <li>- Kebijakan yang memastikan persamaan perlakuan, kesempatan,</li> </ul>	WIDE+ & EWL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>European Parliament Resolution on Gender in EU Trade Agreements 2018</i> (termasuk inisiatif isu gender dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Chile pada Desember 2017)</li> <li>- <i>EU Action Plan 2017-2019 (Gender pay gap)</i></li> <li>- <i>Charter Of Fundamental Rights Of The European Union 2012</i> (ada pasal tentang kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kesetaraan gaji/upah, kesempatan kerja, dan fasilitas kerja)</li> <li>- <i>2014/124/EU Commission Recommendation</i> Tentang penguatan kebijakan kesetaraan upah/gaji antara perempuan dan laki-laki dengan berdasarkan keterbukaan</li> <li>- <i>Council Directive 2010/18/EU (parental leave)</i> (termasuk lama waktu dan periode minimal— min. 1 tahun 3 kali dan harus diterapkan di semua jenis pekerjaan baik paruh maupun penuh waktu dengan hukuman bila melanggar direksi ini)</li> <li>- <i>European Parliament Resolutions on Maternity Leave 2010</i> (menambah durasi</li> </ul>
---	---------	--	-------------	--

		fasilitas, dan perlindungan antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan apapun.		<p>minimum dari 14 minggu ke 20 minggu dengan gaji penuh)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council</i> (keterbukaan informasi perusahaan dan pekerja nya untuk memastikan keseimbangan gender tercapai)</li> <li>- <i>Directive 2010/41/EU</i> Kebijakan kesetaraan perlakuan dan kesempatan terhadap kegiatan usaha mandiri antara perempuan dan laki-laki)</li> </ul>
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, khususnya pendidikan vokasi atau perguruan tinggi</li> <li>- Tuntutan untuk melibatkan perempuan dalam aktivitas berpikir (<i>think tank</i>, grup ahli, dan penelitian-penelitian)</li> </ul>	EWL & ESU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Council Recommendation 2011/C 191/01</i> Rekomendasi kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah dini</li> <li>- <i>Europe 2020 strategy</i> (peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan bagi perempuan juga termasuk di dalam strategi panjang dan komprehensif ini)</li> <li>- <i>Regulation (EU) No 1288/2013</i> Termasuk inisiatif program-program peningkatan pendidikan yang partisipasinya mempertimbangkan kesetaraan gender, seperti ERASMUS+ (pelatihan <i>skills</i>, pendidikan formal, dan berbagai beasiswa pendidikan).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi angka putus sekolah dan angka anak yang belum menempuh pendidikan, khususnya perempuan yang lebih tinggi angka nya di Uni Eropa.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Regulation (EU) No 1292/2013</i> Amandemen dari kebijakan tahun 2008 tentang <i>European Institute of Innovation and Technology</i> dengan lebih memperhatikan keseimbangan gender dalam pendidikan tinggi, riset, inovasi, pengalaman bisnis, dan <i>think tank</i> dalam Uni Eropa.</li> <li>- <i>Regulation (EU) No 1290/2013</i> "Horizon 2020 - <i>the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)</i>" termasuk keseimbangan gender dalam partisipasi pendidikan, riset dan penelitian, serta grup ahli.</li> <li>- Program ERASMUS+ dan <i>European Week of Action for Girls (EWAG)</i> (program beasiswa pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas pendidikan oleh gerakan perempuan yang disponsori langsung oleh Uni Eropa)</li> </ul>
4	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecualian dan perlindungan khusus terhadap perempuan dan ibu hamil, termasuk dalam</li> </ul>	EWL, EIWH, dan <i>The End FGM EU</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Directive 2011/36/EU &amp; Directive 2012/29/EU</i> (kebijakan awal tentang isu perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan</li> </ul>

		<p>area kerja, uji klinis, dan isu FGM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya kebijakan tegas dalam menyikapi isu kekerasan terhadap perempuan di dalam sosial masyarakat.</li> <li>- Kebijakan atau program yang relevan dan efektif untuk menghilangkan ketidaksetaraan antara gender dalam bidang kesehatan, baik pengakuan sebagai isu <i>public health</i>, hak reproduksi, dan seksual, status kesehatan, hingga fasilitas kesehatan.</li> </ul>		<p>serta disebutkan pentingnya peningkatan kesadaran akan isu tersebut di Uni Eropa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Council of Europe on Istanbul Convention 2017 &amp; Regulation (EU) No 606/2013 tentang violence against women</i> Kebijakan diatas termasuk kebijakan yang bersifat <i>legal-binding</i>. Namun, hingga 2018 masih ada 11 negara anggota yang belum meratifikasinya.</li> <li>- <i>European Parliament Resolution</i> dalam laporan tahunan <i>Human Rights and Democracy in the World 2014</i> dan <i>the European Union's policy on the matter</i> pada 17 Desember 2015 yang berisi larangan keras adanya praktek <i>surrogacy</i>.</li> <li>- <i>Regulation (EU) No 282/2014</i> tentang kesehatan publik yang berlanjut pada <i>EU Occupational Safety and Health Strategic Framework 2014-2020</i> (termasuk kesehatan perempuan hamil di area kerja dan pencegahan resiko-resiko penyakit khusus perempuan)</li> </ul>
--	--	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The EU Health Programmes 2003-2013, Parliament Resolution 2011 &amp; Council Recommendation on closing the health gaps 2011/C 359/05</i> (Program Uni Eropa dengan berbagai macam organisasi/lembaga sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dalam bidang kesehatan)</li> <li>- <i>European Parliament Resolution 2012</i> Membahas tentang perlunya menanggulangi isu <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) dengan kebijakan dalam negeri yang lebih relevan.</li> <li>- <i>Regulation (EU) No 536/2014 of The European Parliament and of The Council</i> Kebijakan untuk mengatur masalah uji klinis pada obat-obatan yang digunakan manusia terutama pada uji kasus tertentu yang melibatkan perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui (<i>gender based clinical trials</i>).</li> </ul>
5	Politik	- Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembuat keputusan politik (kepala negara, parlemen	EWL	- <i>Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014</i> kebijakan tentang pengadaan anggaran sebagai alat mencapai demokrasi dan hak asasi manusia

		<p>nasional/Uni Eropa, Komisi Eropa, menteri-menteri, ketua partai atau perwakilan partai dalam pemilu, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi akses/kuota gender di dalam badan legislatif tingkat negara maupun badan Uni Eropa</li> </ul>		<p>yang4 mendunia, termasuk pemberdayaan dan keterwakilan perempuan dalam kursi pembuat keputusan politik baik di badan Uni Eropa maupun di level negara.</p> <p>- <i>European Parliament Resolution of 13 March 2012 on women in political decision-making 2013/C 251 E/02</i></p> <p>(resolusi untuk pemberdayaan perempuan dalam politik yang tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas, termasuk inisiatif kuota gender, sistem nominasi dalam partai politik, hingga <i>EU expert grup/parliament/executive grup</i>)</p>
--	--	---	--	---

*Sumber : Website resmi European Women's Lobby, European Student's Union, Women in Development Europe+, European Institute of Women's Health dan EUR-Lex Uni Eropa*